BAB II

PERAN INDONESIA DALAM ASEAN

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang bagaimana peran Indonesia dalam mempengaruhi kawasan Asia Tenggara khususnya di tubuh ASEAN. Namun sebelumnya akan dibahas terlebih dahulu mengenai pembentukan ASEAN, diawali dengan latar belakang terbentuknya ASEAN hingga perkembangannya dewasa ini. Berikutnya dalam bab ini penulis juga akan menjelaskan secara singkat mengenai inisiasi pembentukan East Asia Summit, suatu forum perluasan ASEAN yang diprakarsai Indonesia.

A. Latar Belakang Berdirinya ASEAN

Secara geopolitik dan geoekonomi, kawasan Asia Tenggara memiliki nilai yang sangat strategis. Hal tersebut tercermin dari adanya berbagai konflik di kawasan, baik yang melibatkan sesama negara-negara di kawasan maupun yang melibatkan kepentingan negara-negara besar pasca Perang Dunia II, sehingga Asia Tenggara pernah dijuluki sebagai "Balkan-nya Asia".[22]

Persaingan antar negara adidaya dan kekuatan besar lainnya di kawasan antara lain terlihat dari terjadinya Perang Vietnam. Kemudian disusul dengan persaingan ideologis antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam memperebutkan pengaruh di kawasan yang dengan sendirinya mempengaruhi politik luar negeri masing-masing negara anggota ASEAN. Disamping itu, konflik kepentingan juga terjadi diantara sesama negara-negara Asia Tenggara

---

[22] [illegible] ASEAN, "ASEAN Sekurang Bandung" (edisi ke-17), Jakarta:

ditandai dengan pergulatan perebutan kekuasaan antarnegara yang ada di kawasan daratan maupun maritim Asia Tenggara. Kemudian konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia, klaim teritorial antara Malaysia dan Filipina mengenai Sabah, serta berpisahnya Singapura dari Federasi Malaysia.

Dilatarbelakangi oleh hal tersebut, maka negara-negara Asia Tenggara menyadari perlunya dibentuk kerjasama untuk meredakan rasa saling curiga dan membangun rasa saling percaya, mendorong kerjasama pembangunan kawasan, serta menjamin keamanan nasional dan internasional baik bagi negara-negara Asia Tenggara maupun kemanan secara global.

Sebelum ASEAN terbentuk pada tahun 1967, negara-negara Asia Tenggara telah melakukan berbagai upaya untuk menggalang kerjasama regional baik yang bersifat intra maupun ekstra kawasan. Untuk pertama kalinya negara-negara di Asia Tenggara mengenal organisasi regional pada saat terbentuknya SEATO *(South East Asia Treaty Organization)*. Organisasi ini sebenarnya lebih merupakan upaya Amerika untuk membendung pengaruh komunis di kawasan Asia Tenggara. Sedangkan organisasi yang dibentuk sepenuhnya oleh negara-negara Asia Tenggara untuk pertama kalinya adalah ASA (*Association of Southeast Asia)* (ASA) pada tahun 1961. Negara anggotanya adalah Malaysia, Filipina, dan Thailand. Organisasi awal ini tidak bertahan lama karena pecahnya konflik Filipina dan Malaysia atas status daerah Sabah yang diklaim sebagai bagian dari Filipina. Konflik ini mendorong terbentuknya Maphilindo (Malaysia, Filipina, Indonesia), tetapi

Politik konfrontasi yang dilancarkan Sukarno meremukkan pondasi Maphilindo. Namun dengan tumbangnya rejim Soekarno dan kemunculan Soeharto yang cenderung anti-komunis Indonesia kembali berpeluang untuk terlibat dalam perkembangan di kawasan Asia Tenggara.

Maka untuk mengatasi perseteruan yang sering terjadi di antara negara-negara Asia Tenggara dan membentuk kerjasama regional yang lebih kokoh, maka pembentukan ASEAN diawali dengan diadakannya pertemuan tingkat menteri lima negara di Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) di Bangkok pada bulan Agustus 1967. Pertemuan-pertemuan konsultatif tersebut dilakukan secara intensif dan menghasilkan rancangan *Joint Declaration*,[23] yang mencakup kesadaran akan perlunya meningkatkan saling pengertian untuk hidup bertetangga secara baik serta membina kerjasama yang bermanfaat di antara negara-negara yang sudah terikat oleh pertalian sejarah dan budaya, yang pada intinya mengatur tentang kerjasama regional di kawasan tersebut.

Sebagai puncak dari pertemuan tersebut, maka pada tanggal 8 Agustus 1967 ditandatangani Deklarasi ASEAN atau dikenal sebagai Deklarasi Bangkok oleh Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Malaysia dan para Menteri Luar Negeri Indonesia, Filipina, Singapura dan Thailand. Deklarasi tersebut menandai berdirinya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara *(Association of South East Asian Nations)*. Adapun kelima [illegible] yang menandatangani Deklarasi ASEAN sebagai berikut:

1. Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia.
2. Tun Abdul Razak, Wakil Perdana Menteri/Menteri Pembangunan Nasional Malaysia.
3. S. Rajaratman, Menteri Luar Negeri Singapura.
4. Narsisco Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina.
5. Thanat Khoman, Menteri Luar Negeri Thailand.

ASEAN *(Association of South East Asian Nations)* atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (PERBARA), merupakan organisasi kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa dasar berdirinya ASEAN adalah Deklarasi Bangkok yang dicetuskan pada tanggal 8 Agustus 1967. Adapun pada masa awal pendirian ASEAN lebih diwarnai oleh upaya-upaya membangun rasa saling percaya (*confidence building*)[24] antar negara anggota guna mengembangkan kerjasama regional yang bersifat kooperatif.

Pada awal berdirinya, ASEAN hanya memiliki lima negara anggota yang sekaligus sebagai negara pendiri ASEAN. Namun, seiring berjalannya waktu dan kemantapan peran ASEAN di kawasan, saat ini ASEAN telah memiliki 10 negara anggota. Sesuai dengan Pasal 4 Deklarasi Bangkok, keanggotaan ASEAN terbuka bagi seluruh negara-negara Asia Tenggara dengan syarat negara-negara calon anggota dapat menyetujui dasar-dasar dan tujuan organisasi ASEAN seperti yang tercantum dalam Deklarasi ASEAN dan

adanya kesepakatan semua negara anggota ASEAN mengenai keanggotaan baru ASEAN.[25] Proses perluasan keanggotaan ASEAN hingga tercapainya ASEAN-10 adalah sebagai berikut :

1. Brunei Darussalam secara resmi diterima menjadi anggota ke-6 ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984, dalam Sidang Khusus Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN di Jakarta.
2. Vietnam diterima menjadi anggota ke-7 ASEAN dalam Pertemuan Para Menteri Luar Negeri (AMM) ke-28 pada tanggal 29-30 Juli 1995 di Bandar Seri Begawan.
3. Laos dan Myanmar diterima sebagai anggota penuh ASEAN melalui suatu upacara resmi pada tanggal 23 Juli 1997 dalam (AMM) ke-30 di Subang Jaya, Malaysia, tanggal 23-28 Juli 1997.
4. Kamboja adalah negara ke-10 yang diterima sebagai anggota penuh ASEAN pada upacara penerimaan resmi di Hanoi tanggal 30 April 1999.

A.1. Tujuan dan Prinsip ASEAN

Tujuan dibentuknya ASEAN seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok adalah untuk :

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan

sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai;

2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara-negara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
3. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi;
4. Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, profesi, teknik dan administrasi;
5. Bekerjasama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri mereka, memperluas perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional, memperbaiki sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat mereka;
6. Memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara;
7. Memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang mempunyai tujuan serupa, dan untuk

Sepanjang sembilan tahun pertama sejak dibentuk merupakan saat yang penting dan menentukan karena sepanjang waktu itulah interaksi antarnegara menjadi sumber nilai bagi pembentukan norma-norma yang kelak menjadi pondasi unuk keberlangsungan hubungan antar-negara.[26] Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama (*Treaty of Amity and Cooperation)* yang ditandatangani pada pertemuan puncak ASEAN pertama di Bali tahun 1976 sering disebut sebagai wujud dari nilai-nilai global yang mendasari pembentukan organisasi regional.[27] Dalam pertemuan Bali tersebut negara-negara ASEAN sepakat untuk (i) saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas wilayah semua bangsa, (ii) setiap negara berhak memelihara keberadaannya dari campurtangan, subversi, kekerasan dari kekuatan luar, (iii) tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, (iv) menyelesaikan perbedaan pendapat dan pertikaian dengan jalan damai, (v) menolak ancaman kekerasan atau penggunaan kekuatan/senjata sebagai penyelesaian masalah-masalah antar negara, dan (vi) kerjasama yang efektif antara negara anggota.

Terdapat paling tidak empat norma dan prinsip yang melandasi kehidupan ASEAN. *Pertama,* menentang penggunaan kekerasan dan mengutamakan solusi damai. *Kedua,* otonomi regional. *Ketiga,* prinsip tidak

---

[26] Noordin Sopiee, " *ASEAN and Regional Security,* " dalam Mohammad Ayoop (ed). *Regional Security in The Third World.* London: Croom Helm, 1986, hal 229.
[27] Bambang Cipto, *"Hubungan Internasional di Asia Tenggara"*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hal 23.

mencampuri urusan negara lain. *Keempat,* menolak pembentukan aliansi militer dan menekankan kerjasama pertahanan bilateral.[28]

A. 2. Perkembangan Kerjasama ASEAN

Dalam perkembangannya, ASEAN tidak hanya dijadikan sarana untuk menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Kerjasama ASEAN juga meliputi bidang politik, pertahanan, keamanan, dan perdamaian. Ini ditunjukkan dengan kesepakatan lima negara anggota ASEAN (Deklarasi Kuala Lumpur) di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal 27 November 1971.

Deklarasi Kuala Lumpur menyatakan bahwa kawasan Asia Tenggara merupakan *zone of peace, freedom, and neutrality* (ZOPFAN). Artinya, kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang damai, bebas dari pengaruh asing, dan netral (tidak memihak ke blok atau pihak mana pun). Beberapa kesepakatan lain dalam bidang politik dan keamanan juga dibuat. Yakni dalam Perjanjian Kawasan Bebas Senjata Nuklir dan Pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN. Perjanjian Kawasan Bebas Senjata Nuklir disepakati di Bangkok pada tanggal 15 November 1997. Adapun pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN (*ASEAN Security Community*) disepakati di Bali pada tanggal 7 Oktober 2003, menyambung inisiatif pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) pada KTT ke-12 di Singapura.

---

[28] Amitav Acharya, "*Constructing a Security Community in South East Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order,*" London and New York, Routledge, 2001, hal 45-46.

B. Peran Indonesia Dalam ASEAN

Sejak ASEAN berdiri, Indonesia telah mengambil peran yang sangat penting dan strategis dari masa-masa awal berdirinya, masa konsolidasi, perkembangan ASEAN hingga pada tahap pendewasaan ASEAN yang diwujudkan dengan pembentukan *ASEAN Plus Three, East Asia Summit* serta *ASEAN Community* tahun 2015 mendatang. Hal ini tidak terlepas dari letak geografis Indonesia yang berada pada titik persinggungan antara negara-negara anggota ASEAN dan juga faktor pemimpin (*founding fathers*) dari Indonesia yang memiliki kapasitas seorang pemimpin kelas internasional.

Pada masa awal pembentukan ASEAN, Indonesia melalui ASEAN telah menunjukkan perubahan dalam posisi (*stance*) yang konfrontatif menjadi kooperatif dalam dunia internasional. Tindakan kooperatif Indonesia ini sedikit demi sedikit telah memperbaiki citra Indonesia di mata internasional.[29] Hal ini dapat ditunjukkan dengan sikap serta peran Indonesia di ASEAN yaitu:

1. Sikap Presiden Soeharto yang tidak ingin mendominasi dan mempromosikan *equality*. Hal ini dapat dilihat dari sikap Presiden Soeharto yang menolak dijadikan sebagai "*Father of ASEAN*" yang mengakibatkan meningkatnya kepercayaan antar negara anggota.[30]
2. Presiden Soeharto juga mencetuskan konsep ketahanan nasional (*national resiliance*) yang mengatakan, "*I feel that national resiliance is only answer to the challenges posed by a world still dominated by tension...*".

---

[29] Dikutip dari tulisan Dillo Raditya yang berjudul "*ASEAN sebagai Sarana Diplomasi Indonesia mencapai Ketahanan Regional demi Pembangunan Ekonomi Nasional*", 02 Juni 2010 diakses tanggal 29 Oktober 2010.

[30] [illegible] *ASEAN Community*. Singapore: Utopia

Konsep di atas pada akhirnya menjadi konsep penting yang diadopsi oleh ASEAN dimana konsep ketahanan domestik suatu negara menjadi prioritas ASEAN dengan melihat bahwa ketahanan regional dapat tercapai apabila ketahanan nasional juga tercapai.[31]

3. Perubahan dalam arah kebijakan politik luar negeri Indonesia yang mengakibatkan Indonesia lebih membuka diri terhadap negara-negara lain. Dengan demikian hal ini menunjukkan bagaimana Indonesia berusaha melakukan *multi track diplomacy* untuk mengembalikan kredibilitasnya di mata regional dan internasional.
4. Adam Malik dan beberapa diplomat Indonesia lainnya ikut berpartisipasi dalam menyusun *paper concept* dalam ASEAN. Selain itu mereka juga berpartisipasi dalam mempromosikan ASEAN dengan cara berkeliling mengunjungi ibu kota negara-negara di Asia Tenggara. Keberhasilan lain yang telah dilakukan oleh Indonesia yaitu dalam mempersatukan ASA (*Association of Asia*) dengan ASEAN pada tanggal 28-29 Agustus 1967.
5. Posisi strategis politik luar negeri Indonesia berhasil menarik anggota baru untuk ikut bergabung ke dalam ASEAN dan juga mendirikan stabilitas antar anggotanya. Hal ini dapat terlihat misalnya ketika terjadi invasi oleh Vietnam di Kamboja pada tahun 1970 dan 1980. Berkat ikatan kuat antara Indonesia dan Vietnam akhirnya *Jakarta Informal Meeting* dapat

6. Indonesia menjadi tuan rumah dalam deklarasi ASEAN di Bali (*Bali Concord*) dan *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) pada tanggal 24 Februari 1976. Serta demi menunjukkan komitmennya, Indonesia masih tetap hadir dalam ASEAN Summit ke-3 di Filipina walaupun sedang terjadi ketidakstabilan politik di Indonesia. Wujud nyata kehadiran Indonesia pada waktu itu memicu negara lain untuk datang sehingga konferensi itu tetap berlanjut. Hal-hal tersebut merupakan bukti nyata bahwa Indonesia telah menunjukkan partisipasi aktifnya demi tericiptanya solidaritas di dalam kawasan ASEAN.[32]

Usaha-usaha yang dilakukan oleh Indonesia melalui ASEAN dapat membantu mengembalikan dan menjaga kredibilitas Indonesia di mata dunia internasional. Di mana pada saat itu, kebijakan luar negeri konfrontatif dari Presiden Soekarno, misalnya konfrontasi dengan Malaysia, membangun *image* buruk terhadap Indonesia sebagai negara *expansionist* dan agresif, sehingga hal itu sangat berpengaruh pada perkembangan ekonomi dalam negeri. Untuk mengembalikan perkembangan ekonomi dan stabilitas politik, maka arah dalam kebijakan luar negeri harus dijadikan suatu *means* untuk menarik bantuan ekonomi dan investasi yang berasal dari pihak asing.

Melalui ASEAN, Presiden Soeharto berusaha untuk mengembalikan kredibilitas Indonesia di antara negara ASEAN dan menjadi simbol nyata komitmen Indonesia dalam mengubah citra diri di mata internasional. Dalam

sebagai negara berkembang yang damai dan mempunyai stabilitas politik kepada negara pendonor dan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Tidak hanya sampai disini saja, Indonesia pun terus memainkan peran strategisnya di ASEAN dari masa ke masa, yaitu sebagai berikut:

1. Indonesia sebagai *founding fathers* ASEAN.

Indonesia merupakan salah satu negara pelopor berdirinya ASEAN. Pada saat itu Indonesia adalah salah satu negara yang sedang mengalami suksesi kepemimpin (dari Soekarno ke Soeharto), dimana kedua presiden RI tersebut memiliki perspektif yang cukup bertolak belakang dalam memandang politik luar negeri, terutama dalam hal memandang kerjasama dengan negara-negara regional maupun internasional.

Dapat dikatakan pada masa pemerintahan Soekarno, eksistensi Indonesia mengalami jalan ditempat, hampir tidak ada negara-negara yang sanggup bekerja sama secara harmonis dengan Indonesia, kecuali jika memang ada kedekatan ideologi antara Soekarno dengan pemimpin negara lain. Negara-negara yang mampu menjalin hubungan harmonis dengan Indonesia di masa pemerintahan Soekarno adalah China dan Uni Soviet.[33] China dan Uni Soviet tidak hanya memiliki kemiripan ideologi dengan Indonesia di masa Soekarno, bahkan menjadi mitra dialog ekonomi dan militer yang cukup diperhitungkan oleh Indonesia.

---

[33] [illegible] Jakarta: Pustaka Pelajar, 2007

Lain halnya dengan Soeharto, Soeharto cenderung memiliki jiwa kepemimpinan yang lebih moderat dan terbuka dengan pengaruh negara-negara lain terutama dengan negara yang berhaluan demokrasi. Krisis ekonomi yang dialami oleh Indonesia sebagai dampak dari sistem ekonomi sosialis yang diterapkan oleh Soekarno menjadi alasan yang kuat bagi Soeharto untuk membuka kerjasama dengan negara-negara luar, terutama kerja sama regional. Hal itu tercermin dari tujuan dasar pembentukan organisasi regional ASEAN yaitu, menjalin kerja sama ekonomi, keamanan, sosial dan budaya.[34]

2. Indonesia sebagai tuan rumah KTT ASEAN pertama.

KTT ASEAN pertama kali diadakan di Bali pada tanggal 23-24 Februari 1976. Salah satu kesepakatan penting yang dihasilkan dalam KTT ASEAN I adalah penetapan struktur baru ASEAN yang lebih dinamis dan pembentukan Sekretariat ASEAN di Jakarta.

Adapun struktur organisasi ASEAN pada waktu itu terdiri dari *Annual Ministerial Meeting* (AMM), *Standing Committee* (SC), *Permanent Committee* (PC), *Ad-Hoc Committee* (AC), dan *National Secretariats* di setiap negara anggota. Dan yang cukup membanggakan bagi Indonesia adalah dibentuknya *ASEAN Secretariat* (Sekretariat ASEAN) yang ditetapkan di Jakarta. Adapun yang menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) ASEAN pertama adalah H.R. Dharsono, seorang putra Indonesia. Hal

[34] Sjamsumar Dam dan Riswandi, "*Kerjasama ASEAN: Latar Belakang, Perkembangan dan Masa Depan*" Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995, hal 17.

tersebut memberikan gambaran bahwa negara kita cukup berperan besar dalam ASEAN.

3. Indonesia sebagai penengah dalam konflik Kamboja.

Konflik Kamboja diawali dengan kemenangan Vietnam Utara yang berideologi komunis atas Vietnam Selatan. Selain itu rencana pengurangan kekuatan militer Amerika Serikat di Filipina juga memicu invasi Vietnam ke Kamboja.[35]

ASEAN, terutama Indonesia memiliki dua pandangan dalam memandang invasi Vietnam ke Kamboja, (1) pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar hubungan negara, yakni *non-interference* dan *non-use of force* dan (2) melalui Menteri Luar Negerinya, Indonesia diberbagai forum atau pertemuan regional menyatakan secara terbuka bahwa invasi Vietnam ke Kamboja merupakan isu yang telah memecah belah ASEAN.[36] Oleh karena itu, Indonesia beranggapan bahwa invasi Vietnam ke Kamboja harus diakhiri secepat mungkin.

Pada dasarnya Indonesia telah mengupayakan perdamaian di Kamboja pada tahun 1987, bahkan pada pertemuan pemimpin ASEAN yang tergabung dalam JIM (*Jakarta Informal Meeting*), para pemimpin ASEAN yang juga dihadiri oleh Perdana Menteri saat itu sepakat untuk menarik pasukan Vietnam tanpa syarat di Kamboja.

Sebagai tambahan, sejak tahun 1977 terjadi perubahan politik luar negeri Vietnam terhadap ASEAN. Perdana Menteri Vietnam pada saat itu

---

[35] Stephen J. Morris, *Why Vietnam Invaded Cambodia: Political Culture and the Causes of War*, Stanford, California: Stanford University Press, 1999, hal 220-222.
[36] *Far Eastern Economic Review*, 11 Juli 1991.

melakukan kunjungan persahabatan ke kawasan ASEAN sebagai upaya untuk memperbaiki hubungan yang sebelumnya diliputi rasa bermusuhan.[37]

4. Indonesia sebagai mediator dalam konflik antara gerakan separatis Moro (MILF) dan pemerintah Filipina.

Pada dasarnya upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Indonesia dalam perdamaian antara MILF dan pemerintah Filipina telah dilakukan sejak masa pemerintahan Gloria Arroyo, namun baru di akomodir sepenuhnya oleh Presiden Filipina yang baru Benigno Aquino.

Semasa pemerintahan Gloria Arroyo, Indonesia telah dilibatkan dalam perundingan damai bagi konflik Mindanao, hal ini tercermin dari diundangnya Jusuf Kalla oleh pemerintah Filipina, selain itu tokoh-tokoh yang diminta untuk menjadi penengah adalah Prof Omar Dajani (Palestina), Nuruledin Sati (Sudan), Gerry Kelly (Irlandia Utara). Seorang juru runding internasional lainnya yang terlibat adalah David Gorman dari Center Humanitarian Dialog.[38]

Bukan tanpa alasan Filipina meminta Indonesia sebagai penengah perdamaian, hal ini didasarkan pada keberhasilan Indonesia dalam mengatasi berbagai konflik yang berkaitan dengan sentimen agama dan murni gerakan separatis, seperti konflik Poso, tragedi Ambon, konflik Sampit dan perdamain antar GAM dengan Indonesia.[39]

---

[37] Donald E. Weatherbee, *International Relations in Southeast Asia The Struggle for Autonomy*, Lanham: Rowman & Little Field Publisher Inc, 2005, hal 75.
[38] Dikutip dari *Bisnis Indonesia Online* edisi Selasa 20 Juli 2010.

5. Indonesia sebagai inisiator Pembentukan Komunitas ASEAN di KTT ASEAN ke-9 bulan Oktober 2003 di Bali.

Indonesia yang pada saat itu menjadi Ketua ASEAN terdorong untuk mengajukan konsep Komunitas Keamanan ASEAN (ASC). Indonesia mengharapkan komunitas keamanan ASEAN dapat terbentuk sejalan dengan pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN yang telah diajukan sebelumnya oleh Singapura pada KTT ke-8 tahun 2002 di Cambodia. Dua konsep tersebut diharapkan terealisasi pada tahun 2020 (yang kemudian dipercepat di tahun 2015) guna mewujudkan suatu Komunitas ASEAN.

Sesuatu yang sangat rasional jika Indonesia mengusulkan konsep komunitas keamanan dalam komunitas ASEAN 2015, karena sejak beberapa dekade terakhir terjadi pergeseran paradigma dalam memandang keamanan. Keamanan tidak lagi relevan jika dipandang sebagai hal yang menyangkut kekuatan militer dan upaya untuk mempertahankan kedaulatan wilayah negara, tetapi menyangkut keamanan diri pribadi manusia (pangan, ideologi, hak sebagai warga negara, masalah lingkungan hidup dan juga masalah terrorisme).

Variabel dari keamanan non-tradisional diatas tengah menjadi isu yang sangat hangat dan menjadi perhatian khusus pemerintah Indonesia, sehingga jika isu-isu keamanan diangkat secara tidak langsung tengah membahas keadaan internal Indonesia. Hal itu terbukti dari besarnya

misalnya Australia menggelontorkan dana jutaan milyar dolar untuk membantu Polri mengatasi masalah terrorisme.[40]

Selain itu juga isu lingkungan hidup sebagai imbas dari pemanasan global masuk dalam kategori keamanan non-tradisional [41], Indonesia yang merupakan 1/3 paru-paru dunia yang menghasilkan udara bersih berkesempatan memainkan isu lingkungan di forum regional dan internasional untuk mendapatkan keuntungan materi, hal ini dapat dilihat dari kesediaan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lainnya membiayai hutan-hutan Indonesia dengan nilai jutaan dolar AS per tahunnya dan membantu Indonesia memitigasi produk-produk yang ramah lingkungan.

6. Pada tahun 2004, Indonesia sebagai pemimpin di ASEAN.

Selama memimpin, Indonesia menyelenggarakan serangkaian pertemuan. Di antara pertemuan itu adalah Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN *(ASEAN Ministerial Meeting)*, Forum Kawasan ASEAN *(ASEAN Regional Forum)*, Pertemuan Kementerian Kawasan mengenai Penanggulangan Terorisme, dan beberapa pertemuan lainnya.

7. Pada bulan Agustus 2007, diresmikan ASEAN Forum di Jakarta.[42]

Forum yang dihadiri oleh seluruh kepala negara dan kepala pemerintahan negara-negara anggota ASEAN ini diadakan guna mendukung, membahas dan mengkonsolidasikan seluruh negara-negara

---

[40]Diakses dari www.kompas.co.id edisi bulan September 2010 pada tanggal 21 Oktober 2010.
[41]Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Adde M. Wirasenjaya,. S.IP dosen di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, UMY dalam mata kuliah *Politik Lingkungan Global* April 2010.
[42] [illegible] 20 oktober 2010

ASEAN dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan di dalamnya dalam persiapan terwujudnya Komunitas ASEAN 2015.

Indonesia sebagai inisiator Komunitas ASEAN 2015 dan tuan rumah ASEAN Forum menguatkan komitmennya dan mengajak seluruh negara-negara anggota ASEAN untuk bersikap optimis dan berpikiran positif dalam pencapaian pembentukan Komunitas ASEAN 2015, pertemuan ini sekaligus mempersiapkan hari ulang tahun ASEAN yang ke-43.

Dinamika kawasan Asia Tenggara tidak dapat dilepaskan dari eksistensi ASEAN. Saat ini tampaknya realitas di Asia Tenggara membutuhkan sesuatu yang lebih dari ASEAN. Perubahan situasi keamanan internasional, pergeseran dari paradigma ancaman tradisional (perang antar negara, dsb) menjadi non-tradisional (terorisme, konflik internal, kerusakan lingkungan, dll), dan kebangkitan ekonomi dari negara-negara mitra ASEAN, memberikan dampak riil terhadap situasi di kawasan Asia Tenggara. Situasi-situasi terakhir menunjukkan tantangan-tantangan yang menuntut suatu mekanisme regional yang lebih efektif dan demokratis.[43]

Salah satu bentuk kerja sama regional yang relevan untuk menghadapi tantangan-tantangan dan menyikapi pergeseran paradigma seperti yang disebutkan diatas, tampaknya sebuah kerjasama yang diidentitaskan oleh komunitas adalah jawabannya.

---

[43]Dalam jurnal yang ditulis oleh Yanyan Mochamad Yani dosen senior pada Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung-Indonesia melanjutkan hasil seminar yang disampaikan pada acara Seminar Nasional "*Sosialisasi ASEAN*

8. Indonesia sebagai tuan rumah ASEAN pada tahun 2011 mendatang[44].

ASEAN telah memberikan sumbangan besar terhadap terciptanya suasana damai yang kondusif bagi pembangunan politik, ekonomi, dan sosial budaya di Asia Tenggara dan semua itu tidak terlepas dari peran Indonesia di ASEAN. Apalagi di usianya yang ke-43 ini, ASEAN menghadapi perkembangan global dan regional yang sangat dinamis.

Setidaknya terdapat 3 hal dimana Indonesia dapat berkontribusi di dalamnya. Pertama, Indonesia memiliki keyakinan kawasan ASEAN harus terus menjadi kawasan yang stabil dan bahkan memberikan kontribusi bagi penciptaan kawasan yang damai dan stabil. Indonesia juga senantiasa mendorong peran sentral ASEAN dalam mengembangkan tatanan kawasan yang memiliki keseimbangan dinamis atau *dynamic equilibrium.* Sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan dan harmonis di antara para pemangku kepentingan Negara di kawasan. Indonesia juga akan senantiasa mendorong Komunitas ASEAN yang terbuka terhadap pengembangan dan penerapan nilai-nilai demokrasi, penghormatan hak asasi manusia dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kedua, kesejahteraan rakyat merupakan sesuatu yang senantiasa menjadi salah satu prioritas ASEAN. Komunitas ekonomi ASEAN memungkinkan peluang yang lebih besar, baik bagi Indonesia maupun negara ASEAN untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan daya saingnya di kancah global.

---

[44] http://www.tabloiddiplomasi.org/current-issue/108-4-article/964-menlu-ri-selalu-ada-nilai-

Ketiga, bagi Indonesia ASEAN harus relevan bagi masyarakatnya, termasuk bagi rakyat Indonesia. Pembangunan Komunitas ASEAN harus melibatkan seluruh komponen masyarakat negara-negara ASEAN. ASEAN harus dekat dengan masyarakatnya. ASEAN juga harus mampu menampung aspirasi luas seluruh pemangku kepentingan. Ini pada gilirannya akan membangun semangat ke-ASEAN an yang tinggi di kalangan masyarakat ASEAN.

Tiba gilirannya Indonesia diberi kepercayaan untuk memimpin kawasan yaitu dengan menjadi ketua ASEAN tahun 2011 mendatang. Hal ini merupakan kesempatan yang baik bagi Indonesia untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian Komunitas ASEAN tahun 2015. Sebagai tuan rumah bagi berbagai pertemuan ASEAN, ini juga merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan identitas dan citra Indonesia sebagai bangsa yang sedang bergerak maju di segala bidang.

C. Inisiasi East Asia Summit

Berbicara mengenai ASEAN, dari awal terbentuknya hingga perkembangannya dewasa ini, ASEAN tidak hanya menitikberatkan pada permasalahan keamanan kawasan, tetapi juga masalah perekonomian yang tidak kalah pentingnya. Pasca perang dingin fenomena ekonomi mewarnai politik internasional. Perekonomian menjadi isu penting dalam kerjasama regionalisme di Asia, tak terkecuali kawasan Asia Tenggara. Semakin ketatnya persaingan ekonomi menuntut ASEAN untuk bekerjasama lebih luas dengan

negara lain, misal dengan dibentuknya ASEAN *Plus Three* (APT) dan East Asia Summit (EAS).

Krisis ekonomi yang menerjang negara-negara ASEAN tahun 1997 mendorong pertumbuhan kelompok baru yang melibatkan ASEAN dan tiga negara Asia lain yaitu China, Jepang dan Korea Selatan, yang kemudian dikenal sebagai ASEAN+3 (ASEAN *Plus Three*). Gagasan pembentukan ASEAN+3 (APT) sesungguhnya merupakan manifestasi dari pemikiran cerdas Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Muhammad tahun 1990 dalam bentuk *East Asia Economic Grouping* (EAEG). Pemikiran ini dipicu oleh keprihatinan Mahathir terhadap dominasi Amerika dalam bidang ekonomi dan didorong oleh keinginan Malaysia sebagai bangsa Asia yang mengharapkan pembentukan blok regional sebagai konsekuensi logis dari era pembentukan blok perdagangan pada awal dekade 90-an.[45]

Pertemuan APT pertama berlangsung di Kuala Lumpur, Desember 1997. Munculnya kerjasama ASEAN+3 dipicu oleh adanya krisis ekonomi Asia yang telah menimbulkan kesadaran akan pentingnya menggalang kerjasama dengan negara-negara besar di wilayah Asia Timur.[46] ASEAN+3 menekankan komitmen untuk peningkatan kerjasama dalam berbagai bidang, khususnya bidang ekonomi dan sosial. Kerjasama ekonomi meliputi keuangan, sumber daya manusia, iptek, budaya, informasi, dan pembangunan, sedangkan di bidang politik termasuk isu-isu lintas batas negara.

Perubahan yang berlangsung cepat pasca krisis ekonomi Asia mempengaruhi dinamika pertumbuhan APT. Terobosan yang diprakarsai

---

[45] Bambang Cipto, *Ibid*, hal 76-77

[46] Direktorat Jenderal Kerja sama ASEAN: "*ASEAN Selayang Pandang*" edisi ke-17 (Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI, 2007), hal 126

ASEAN ini bukan tanpa masalah. Ada beberapa persoalan yang menghadang masa depan APT. *Pertama,* China dan Jepang adalah negara Asia dengan aspirasi kepemimpinan yang sangat kuat. Isu sejarah masa pendudukan Jepang di China dan persaingan ekonomi kedua negara semakin mempertajam kompetisi keduanya. Kedua, perbedaan kekuatan ekonomi anggotanya juga merupakan persoalan besar. Indonesia, misalnya, tidak mudah bersaing dengan Singapura apalagi dengan Jepang yang kaya raya. Kondisi ini sudah tentu mempengaruhi kinerja APT. Ketiga, negara-negara ASEAN sendiri cenderung mengembangkan kerjasama bilateral. Persoalan-persoalan di atas tampaknya akan menjadi penghambat kemajuan dan perkembangan APT di masa depan.

Merujuk pada dinamika hubungan kerjasama di kawasan Asia tersebut, dalam berbagai dimensinya, terkait dengan perkembangan peran strategis aktor-aktor kunci seperti China, Jepang, Korea Selatan, dan ASEAN. Secara faktual, upaya yang ditempuh kekuatan-kekuatan tersebut dalam menjaga keberlanjutan gerak maju ekonomi dan postur strategisnya dapat berpengaruh pada tingkat stabilitas perdamaian dan kemakmuran baik dalam lingkup kawasan itu sendiri maupun global. Indonesia sebagai negara yang banyak memberikan pengaruhnya terhadap kawasan merasa perlu untuk lebih memperluas hubungan kerjasama ASEAN yang tidak hanya terpaku pada tiga negara Asia saja. Karena itulah dipilih India, Australia, dan Selandia Baru yang tidak keluar dari kawasan Asia Timur ini. Selanjutnya untuk membedakan antara EAS dan APT, akhirnya disepakati bahwa East Asia Summit (EAS) adalah pertemuan 16 negara, yaitu ASEAN+3 ditambah India, Australia, dan

Plus Three (China, Jepang, dan Korea Selatan) sebagai kendaraan menuju *East Asia Community.*[47]

Dewasa ini, ASEAN harus menghadapi banyak tantangan-tantangan lain di masa depan, seperti keamanan tradisional dan non-tradisional, perluasan forum-forum ekonomi dan keamanan yang diprakarsai ASEAN, dan tantangan lainnya. Dan tidak hanya sampai di sini saja, bahkan Indonesia terus berupaya untuk memainkan peran serta pengaruhnya di tubuh ASEAN. EAS misalnya, merupakan suatu forum perluasaan APT yang diakomodir ASEAN melalui Indonesia sebagai pemrakarsa.

Pada bab selanjutnya, penulis akan menggabarkan secara umum mengenai East Asia Summit, diawali dengan latar belakang terbentuknya hingga perkembangan mengenai isu perluasaan keanggotaan yang akan melibatkan AS sebagai peserta baru forum. Kemudian penulis juga akan menjelaskan apa saja yang menjadi kepentingan AS terhadap kawasan dan bagaimana upaya AS untuk turut serta berpartisipasi dalam keanggotaan EAS. Berikutnya adalah penjelasan mengenai tanggapan serta perubahan sikap